

## **BAB IV**

### **UPAYA UNI AFRIKA DALAM MENANGANI KELOMPOK BOKO HARAM DI NIGERIA TAHUN 2009-2015**

#### **A. Latar Belakang Intervensi Uni Afrika**

Kondisi keamanan dan perdamaian di Nigeria semakin terancam sejak Boko Haram mulai beroperasi di beberapa wilayah bagian negara tersebut. Kelompok pemberontak tersebut melakukan serangan terhadap pemukiman penduduk dan memerangi siapa saja yang dianggap mengancam system pendidikan dan kehidupan kebarat-baratan. Karena tujuan dari sekte ini adalah mendirikan sebuah negara muslim yang bebas dari pengaruh dunia barat. Hal itu semakin diperburuk sejak serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria timur laut tahun 2009 yang lalu. Serangan tersebut menyebabkan 700 orang tewas dan salah satunya yaitu Muhammad Yusuf pemimpin kelompok tersebut. Hal tersebut terus semakin diperparah dengan timbulnya protes dari para pendukung Muhammad Yusuf yang merasa ada kekecewaan dalam kematian pemimpin mereka. Sejak saat itu pula kepemimpinan Boko Haram diambil alih oleh Abubakar Muhammad Shekau yang dianggap lebih pemberani dan radikal. Sehingga sejak saat itu Boko Haram menjadi sebuah kelompok yang lebih radikal dibandingkan saat dibawah pimpinan Muhammad Yusuf.

Kelompok ini pernah mengeluarkan pernyataan kebencian pada bulan juli 2011 dan mengingatkan penduduk Nigeria agar menjauhi kaum kristiani, pejabat pemerintah, serta tempat tinggal mereka. Hal tersebut diungkapkan karena mereka akan menjadi target penyerangan selanjutnya;

*“This is a government that is not Islamic. Therefore, all its employees-Muslims and non-Muslims are Infidels. (...) therefore, we have the right to kill them all. But if there are people who profess Islam and do not take part*

*in Government or Western Education, their blood and wealth are sacred unless otherwise.”(Zaid, 2011).*

Selain itu, Boko Haram terus melakukan serangan terhadap pemukiman penduduk yang menyebabkan banyaknya korban tewas serta ribuan penduduk Nigeria menjadi pengungsi. Tidak hanya pemukiman penduduk yang menjadi target serangan, tapi fasilitas umum seperti kantor polisi, fasilitas militer, bank, dan penjara juga diserang oleh kelompok ini. Bahkan, Boko Haram mulai memperluas serangannya ke target internasional. Menurut catatan Human Right Watch, pada bulan Agustus 2011 kelompok ini melakukan serangan bom mobil bunuh terhadap markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Abuja. Serangan tersebut menyebabkan 24 orang tewas dan 100 orang lebih mengalami mengalami luka-luka (Human Right Watch, 2011). Pada hari Natal tahun 2012, Boko Haram kembali melakukan serangan terhadap sebuah gereja yang menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas. Akibat penyerangan tersebut, presiden Nigeria Jonathan Goodluck mengunjungi gereja Katholik St. Theresa yang terkena serangan bom oleh Boko Haram pada tanggal 31 Desember 2012. Pada kunjungan tersebut, Jonathan juga menyatakan keadaan darurat “krisis tersebut dianggap memiliki dimensi terorisme karena tidak hanya menyerang penduduk sipil tetapi juga menyerang lembaga-lembaga pemerintah, seperti markas besar PPB dan tempat-tempat ibadah. Sementara upaya penghentian krisis terus dilakukan, adalah sangat perlu untuk mengambil sebuah tindakan yang tegas guna memulihkan keadaan normal di Nigeria, khususnya di wilayah-wilayah yang diserang. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang telah dimandatkan kepada saya berdasarkan Undang-Undang 305, pasal satu konstitusi, saya menyatakan keadaan darurat” (Loomis, 2012). Selanjutnya pada tiga minggu pertama di tahun 2012, Boko Haram juga melakukan serangan bom bunuh diri yang menyebabkan lebih dari 253 orang tewas, serta menyebabkan sedikitnya 185 polisi dan penduduk di kota utara Kano tewas dalam serangan tangga

20 Januari 2012. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak dalam satu hari serangan (Human Right Watch, 2011).

Pada bulan Februari 2013, Boko Haram menculik sebuah keluarga berkebangsaan Perancis dan merilis sebuah video keluarga yang disandera tersebut. Kelompok ini menuntut pemerintah Nigeria untuk membebaskan anggota kelompok mereka yang disandera di Kamerun. Ini bukan satu-satunya kasus yang disebabkan oleh kelompok radikal tersebut. Boko Haram terus melakukan serangan ke fasilitas militer dan fasilitas umum lainnya, seperti sekolah dan masjid. Pada tanggal 6 Juli 2013, kelompok ini menyerang sebuah sekolah di negara bagian Yobe yang menyebabkan 20 orang tewas termasuk siswi dan guru. Selain itu, pada bulan Agustus 2013 kelompok ini kembali melakukan serangan terhadap sebuah masjid di Konduga, negara bagian Borno yang menyebabkan 44 orang tewas (CNN, 2014). Serangan oleh Boko Haram tahun 2013 diakhiri dengan serangan yang dilakukan oleh orang-orang bersenjata ke sebuah asrama di Fakultas Pertanian Gujba di negara bagian Yobe. Mereka melepaskan tembakan kepada para siswa yang sedang tidur dan mengakibatkan 44 orang tewas dalam serangan tersebut. Mengutip dari VOA, Boko Haram bertanggung jawab atas tewasnya lebih dari 20.000 orang sejak pemberontakan yang dilakukan pada tahun 2009 di Timur Laut Nigeria. Selain itu, serangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Boko Haram telah menyebabkan lebih dari 2,3 juta orang penduduk Nigeria mengungsi ke empat negara yang dikenal dengan *Lake Chad Basin* (Besheer, 2017).

Boko Haram terus melakukan serangan dan juga penculikan terhadap penduduk di berbagai wilayah Nigeria. Tidak hanya anak-anak muda yang menjadi sasaran kelompok ini, akan tetapi semua usia bisa menjadi korban kekejaman dari Boko Haram. Dikutip melalui CNN, sepanjang bulan Januari hingga Februari 2014 kelompok ini telah melakukan serangan dengan membakar rumah-rumah penduduk di Desa Kawuri yang menyebabkan sedikitnya 45 orang tewas dan sedikitnya 25 orang tewas di Desa Konduga (CNN, 2014).

Selain itu, pada tanggal 4 April 2014 kelompok ini kembali melakukan aksi yang membuat banyak pihak tercengang dan menjadi sorotan dunia internasional dengan melakukan penculikan terhadap 276 siswi sekolah di kota Chibok. Namun, sebanyak 52 orang berhasil melarikan diri saat dalam perjalanan menuju menuju tempat penyanderaan dan 82 orang berhasil dilepaskan pada bulan Mei 2017 yang lalu. Hingga saat ini, pemerintah Nigeria terus melakukan negosiasi dan pemantauan melalui intelijen lokal untuk memastikan agar para siswi beserta korban lainnya dapat di bebaskan dengan selamat (Kompas, 2017).

Serangan Boko Haram terus dilakukan diberbagai bagian wilayah Nigeria yang menyebabkan semakin banyak korban tewas dan bertambahnya pengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Sejak tahun 2009 hingga 2015, kelompok tersebut telah menyebabkan 17.000 orang tewas akibat serangan yang dilakukan di berbagai wilayah (Onishi, 2015). Hal itu tentu saja menimbulkan ancaman bagi keamanan dan perdamaian serta stabilitas regional negaranya, bahkan bagi dunia internasional. Sehingga banyak pihak internasional yang mendesak pemerintah Nigeria untuk segera menghentikan serangan Boko Haram.

Kondisi yang terjadi di Nigeria ini menjadi sorotan oleh banyak pihak internasional, khususnya Uni Afrika. Kecaman dari masyarakat internasional atas lambannya pemerintah Nigeria dalam merespon permasalahan Boko Haram bermunculan. Ketidakmampuan pemerintah Nigeria dalam menghadapi Boko Haram di ungkapkan dalam sebuah laporan Amnesty Internasional yang mengungkapkan bahwa, pasukan keamanan dan kesatuan khusus pemerintah menangkap banyak warga tanpa tuduhan yang jelas (Sadner, 2012). Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga menambahkan Boko Haram dalam daftar terorisme setelah aksi penculikan siswi di kota Chibok pada tahun 2014. Namun dilain pihak, pemerintah Nigeria masih tidak mau meminta bantuan dari pihak internasional, seperti PBB dan Uni Afrika. Karena pemerintah Nigeria telah menggunakan kekuatan dan pengaruh regional

untuk mengendalikan Boko Haram, meskipun hal tersebut belum berhasil (Mickler, 2015).

Lantaran desakan terus-menerus dari berbagai pihak akibat lambannya pemerintah Nigeria dalam merespon serangan Boko Haram, akhirnya pemerintah Nigeria menerima bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak internasional. Menurut Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dan Dewan Keamanan PBB bahwa Nigeria mulai membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak Internasional (Mickler, 2015).

Dengan demikian, peluang Uni untuk menyelesaikan misi serta operasi perdamaian di Nigeria telah terbuka. Sebagai organisasi yang salah satu anggotanya yaitu Nigeria, Uni Afrika merasa perlu untuk membantu memerangi dan menghentikan serangan yang dilakukan Boko Haram. Hal itu menjadi tanggung jawab bagi Uni Afrika sebagai organisasi bagi wilayah regional Afrika. Nigeria menerima bantuan Uni Afrika untuk memerangi Boko Haram dan kerjasama itu pun dimulai saat pertemuan oleh 54 kepala negara anggota pada tahun 2009 setelah Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mendesak kepada seluruh kepala negara anggotanya untuk membantu Nigeria dalam memerangi Boko Haram. Kemudian, para pemimpin Afrika sepakat untuk mengirim 7.500 tentara untuk memerangi kelompok radikal tersebut (Press, 2015).

Selanjutnya, Uni Afrika memainkan sejumlah peran penting dalam penyelesaian konflik Boko Haram di Nigeria. Hal itu dimulai dengan menggelar operasi militer (*peace-keeping operation*) di Nigeria, serta memberikan bantuan dalam bidang ekonomi (*peace-building operation*) serta perlingunan sosial terhadap para korban Boko Haram. Dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif Uni Afrika dan juga tanggung jawab sebagai organisasi kawasan Uni Afrika. serta berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pada setiap perundingan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

## **B. Operasi Militer Uni Afrika di Nigeria**

Sebagai organisasi kawasan regional Afrika, Uni Afrika telah mengambil peran dalam membantu menghentikan dan memerangi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok radikal Boko Haram di Nigeria. Berbagai upaya dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian serta stabilitas negara anggotanya. Campur tangan organisasi ini dalam menangani konflik Boko Haram bahkan dalam hal militer telah diatur dan dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Konstitusi Uni Afrika. Hal tersebut dilakukan jika dalam negara anggota terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika yang juga tercantum dalam Pasal 4 yaitu organisasi ini dapat melakukan intervensi jika negara anggota tidak mampu menyelamatkan warga negaranya dari ancaman kejahatan (Strydom, 2015).

Dalam hal ini, Uni Afrika berperan sebagai *peace-keeping* untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria. *Peace-keeping* merupakan intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan mayoritas merupakan intervensi militer. Dimana intervensi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam membantu negara-negara atau daerah tertentu yang sedang dalam keadaan transisi, yaitu dari kelompok yang saling bertikai dan mencoba untuk saling berdamai. Operasi *peace-keeping* ini biasanya tidak hanya membantu dalam menjaga keamanan, tetapi juga bantuan non militer.

Selain itu, intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika terhadap negara anggota merupakan dari *Peace and Security Council* (PSC), sebuah Badan Keamanan dan Perdamaian di Uni Afrika yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan kontinental. Dimana PSC memiliki 15 anggota, yang dipilih oleh Dewan Eksekutif Uni Afrika. Anggota PSC merupakan perwakilan dari setiap

negara bagian Afrika yang terdiri dari, 3 orang perwakilan Afrika Tengah, 3 orang perwakilan Afrika Timur, 2 orang perwakilan Afrika Utara, 3 orang perwakilan Afrika Selatan, dan 4 orang perwakilan Afrika Barat (PSC, 2014).

Dalam kasus Boko Haram di Nigeria, Uni Afrika memberikan bantuan berupa operasi militer dengan memberikan dukungan kepada pasukan khusus yang bernama *Multinational Joint Task Force* (MNJTF). Pasukan ini merupakan gabungan dari lima negara, yaitu Nigeria, Niger, Chad, Kamerun dan Benin yang bemarkas di ibukota Chad, N'Djamena. MNJTF didukung oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika. Pasukan ini ada sejak tahun 1994 yang dibentuk oleh *Lake Chad Basin Commission* (LCBC) dan berganti nama menjadi *Multinational Joint Task Force* (MNJTF) pada bulan Oktober 2014 (Sawadogo, 2017).

MNJTF dibentuk oleh LCBC yang merupakan gabungan dari negara-negara yang memiliki kekuatan di Afrika, yaitu Nigeria, Niger, Chad, Kamerun dan Benin. Pasukan khusus ini dibentuk dengan tujuan untuk memerangi kejahatan seperti terorisme yang terjadi di kawasan negara tersebut. Karena mayoritas dari negara anggota MNJTF tersebut merupakan sasaran dari serangan yang dilakukan oleh Boko Haram. Sehingga MNJTF terbentuk secara alami berdasarkan kesadaran dari negara-negara tersebut bahwa mereka masuk dalam jangkauan kejahatan yang dilakukan oleh Boko Haram (William Assanvo, 2016).

Dalam pertemuan Uni Afrika di Addis Ababa pada 25 Mei 2015, Komisaris Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika yaitu Smail Chergui, Sekretaris Eksekutif LCBC yaitu Sanusi Imran Abdullahi, serta delegari Menteri Chad bidang Pertahanan Nasional dan Urusan Veteran yaitu Bernaindo Tatola, meresmikan operasional MNJTF yang dikerahkan oleh LCBC dan Benin dengan bantuan Amerika, dalam upaya memerangi kelompok radikal Boko Haram. Pasukan ini terdiri dari 7,500 orang yang terdiri dari tentara, polisi dan warga sipil. Pasukan di pimpin oleh Mayjen Lo Adeosun dari Nigeria (Dorrie, 2015). Pada pertemuan yang di laksanakan di

Yaounde tanggal 5 sampai dengan 7 Februari 2015, personel MNJTF pun ditambah menjadi 8,700 orang. Pasukan MNJTF terus bertambah hingga bulan Agustus 2015, setelah pertemuan para kepala staf dari negara-negara LCBC dan Benin bahwa anggota MNJTF menjadi hamper 11,150 personel yang terdiri dari; Nigeria 3,750 personel, Chad 3,000 personel, Kamerun 2,650 personel, Niger 1,000 personel, dan Benin 750 personel. Akan tetapi, pada KTT Keamanan Regional kedua di Abuja pada tanggal 14 Mei 2016, Muhammad Buhari mengumumkan jumlah total dari MNJTF yaitu 8,500 personel (William Assanvo, 2016).

Pada tanggal 25 November 2015, Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (PSC) memberikan dukungan sepenuhnya kepada MNJTF untuk memerangi Boko Haram di Nigeria. PSC memberikan mandat kepada MNJTF untuk memerangi kelompok radikal tersebut. Mandat yang di berikan untuk MNJTF itu berupa;

*“create a safe and secure environment in the areas affected by the activities of Boko Haram and other terrorist groups ... facilitate the implementation of overall stabilization programmes by the LCBC Member States and Benin in the affected areas, including the full restoration of state authority and the return of IDPs [internally displaced people] and refugees; and facilitate, within the limit of its capabilities, humanitarian operations and the delivery of assistance to the affected populations”* (African Union, 2015).

Mandat yang diberikan kepada MNJTF tersebut antara lain, melakukan operasi militer untuk mencegah perluasan kegiatan Boko Haram, melakukan patrol terutama di kawasan perbatasan dan tempat operasi Boko Haram, mencegah segala pendistribusian senjata atau logistik untuk Boko Haram, dan melakukan pencarian serta membebaskan semua korban penculikan, termasuk para siswi yang menjadi korban penculikan di kota Chibok pada bulan April 2014 (Kodjo,



2015). Selain itu, MNJTF juga ditugaskan untuk melakukan tindakan spesifik dalam hal intelijen, has asasi manusia, informasi dan media.

Mengenai wilayah operasi MNJTF, masing-masing kontingen negara dikerahkan untuk beroperasi di dalam wilayah nasional negaranya dan memprioritasnya negaranya tersebut (William Assanvo, 2016). Oleh karena itu, ada empat sektor pembagian wilayah operasi pasukan MNJTF sebagai berikut;

**Tabel 4.1 Daftar Wilayah Komando MNJTF**

<b>Sektor</b>	<b>Wilayah Basis Komando</b>	<b>Negara</b>
1	Mora	Kamerun
2	Baga-Sola	Chad
3	Baga	Nigeria
4	Diffa	Niger Tenggara

MNJTF melakukan operasi dan menjalankan mandatnya melalui persetujuan Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (PSC). Akan tetapi, pasukan ini berada di bawah wewenang LCBC dan kepala negara anggota juga kepala pemerintah. MNJTF memiliki susunan operasi yang terstruktur, dimana LCBC bertanggung jawab dalam pengawasan politik organisasi ini. Sedangkan Uni Afrika mengatur strategi dan teknis dalam operasi militer yang bekerjasama dengan Sekretarian Eksekutif LCBC, juga berkontribusi dalam mengarahkan dan memberikan perintah kepada pasukan dalam melakukan operasi. Meskipun MNJTF berada dalam wewenang LCBC, akan tetapi LCBC tidak dapat melakukan perannya secara maksimal dikarenakan terbatasnya pengalaman dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, pasukan ini membutuhkan dukungan dalam bidang tertentu seperti administrasi dan manajemen keuangan, teknologi informasi (IT) dan komunikasi, logistik, pelayanan kesehatan dan infrastruktur. Oleh karena itu, kehadiran Uni Afrika

memberikan dukungan penting bagi MNJTF (William Assanvo, 2016).

Dalam hal ini, dukungan dan kontribusi yang dilakukan oleh Uni Afrika untuk MNJTF sangatlah penting. Karena *pertama*, LCBC dan Benin diminta untuk menyediakan kekuatan yang memiliki kerangka hukum yang jelas dan harus mendapatkan persetujuan dari PSC dalam pengaktifannya. *Kedua*, Uni Afrika memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan perdamaian negara anggotanya. Oleh karena itu, setelah KTT Paris Mei 2014 di Washington DC pada tanggal 5 Agustus 2014 dimana Uni Afrika mengumumkan akan berkontribusi dalam memerangi Boko Haram di Nigeria dengan menempatkan kekuatan nasional di negara tersebut. hal itu pun disambut baik oleh LCBC dan Benin (William Assanvo, 2016). Uni Afrika juga bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan oleh MNJTF dalam memerangi kelompok pemberontak Boko Haram. Selain itu, organisasi ini juga memberi pengawasan terhadap MNJTF, dan mengkoordinasikan serta mengelola bantuan dana yang diperoleh dari donator. Semua sumber keuangan yang diberikan untuk MNJTF harus disalurkan melalui Uni Afrika. Oleh karena itu, finansial pasukan ini sangat bergantung pada Uni Afrika (William Assanvo, 2016).

Peran Uni Afrika untuk mengelola sumber pendanaan yang didapatkan dari donator adalah agar dana yang didapatkan tidak hanya diarahkan untuk membeli persenjataan atau peralatan militer lainnya, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan logistic dan kebutuhan material. Dan untuk menutupi kebutuhan bagi anggota MNJTF, yang mencakup transportasi darat dan udara dengan syarat; komunikasi yang aman, intelijen, pengawasan dan pengintai, peralatan untuk markas komando dan kamp di sektor operasi, serta bonus untuk pasukan yang diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar US\$ 90 per hari (William Assanvo, 2016).

Sumber keuangan dari donator yang disalurkan melalui Uni Afrika di dapat dari Nigeria, Swiss, dan Perancis yang

telah menjanjikan bantuan sebesar US\$ 250 juta untuk mendanai pasukan regional yang beranggotakan 8,700 orang tersebut. Bantuan dana yang diberikan tersebut mencakup lebih dari sepertiga anggaran yang telah diumumkan untuk kebutuhan MNJTF yaitu sebesar US\$ 700 juta (Reporter, 2016). Selain itu, bantuan juga didapatkan dari Komunitas Sub-Sahara (CEN-SAD). Hingga tahun 2016, Nigeria telah memberikan bantuan dana sebesar US\$ 30 juta untuk markas komando MNJTF, Inggris sebesar US\$ 3,5 juta untuk Uni Afrika, dan CEN-SAD sebesar US\$ 1,5 juta kepada Chad, Niger dan Benin untuk mempersiapkan kontingen masing-masing (William Assanvo, 2016).

Dalam hal operasionalisasi, pendanaan masih menjadi masalah utama bagi MNJTF (ISS, 2015). Kendala tersebut telah menunda operasionalisasi pasukan tersebut. Sekretariat LCBC di N'Djamena mengungkapkan bahwa negara anggota kesulitan dalam mengatur dan memenuhi keperluan MNJTF dalam berbagai sektor, termasuk finansial. Hal itu terjadi karena negara-negara pendukung sudah dibebani oleh biaya finansial penduduk dan sumber daya untuk memerangi Boko Haram (Nako, 2015). Menurut Komandan MNJTF, Mayor Jenderal Lamidi Adeosun, kendala dalam sektor keuangan yang dialami oleh MNJTF ini juga karena bantuan yang dijanjikan oleh beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan operasional MNJTF sebesar US\$ 700 juta belum dapat dipenuhi (Reuters, 2016).

Pada tahun 2015, kegiatan yang dilakukan oleh MNJTF dalam memerangi Boko Haram belum terlihat dalam bentuk serangan. Hingga pada bulan Februari 2016, pasukan melakukan empat serangan berskala besar yang tersebar di beberapa bagian wilayah Nigeria, yaitu;

- Serangan pertama : tanggal 11-14 Februari 2016 di kota Ngoshe, Nigeria (bagian dari Operation Arrow Five)
- Serangan kedua : tanggal 24 Februari 2016 di kota Kumshe, Nigeria (dekat dengan perbatasan Kamerun)

- Serangan ketiga : tanggal 16 Maret 2016 di daerah Kamerun dan di kota Djibrili dan Zamga, Nigeria (dalam rangka Operasi Tentacule)
- Serangan keempat : tanggal 10-16 Mei 2016 di hutan Madawya, Nigeria.

Setelah empat serangan berskala besar yang dilakukan, pasukan ini kembali melakukan Operasi Gama Aiki pada bulan Juni 2016. Dalam operasi ini, MNJTF mengatakan bahwa sebanyak 31 orang anggota pemberontak Boko haram telah tewas (Olivier, 2016). Semenjak operasi yang dilakukan oleh MNJTF pada tahun 2015, pasukan ini telah berhasil merebut beberapa wilayah di Nigeria yang dikuasai oleh kelompok pemberontak Boko haram. Pada bulan Juli 2016, pasukan ini berhasil merebut kembali kota Damasak sebuah kota nelayan dan pusat irigasi yang berhasil direbut oleh kelompok Boko Haram pada bulan November 2014. Lebih dari 30 orang anggota MNJTF tewas dalam usaha untuk merebut Damasak kembali ke Nigeria. Sebelum Damasak berhasil di rebut kembali, pasukan ini telah lebih dulu membersihkan desa Dutse, sebuah desa di wilayah Niger dari para gerilyawan (Reuters, 2016).

Operasi yang dilakukan oleh pasukan MNJTF ini dikatakan berhasil karena dapat merebut kembali beberapa wilayah Nigeria yang dikuasai oleh kelompok pemberontak Boko Haram. Selain itu, operasi militer yang dilakukan oleh pasukan perdamaian ini telah menyebabkan banyaknya anggota Boko Haram yang tewas. Dalam KTT Keamanan Regional Kedua di Abuja, ibukota Nigeria, Komandan MNJTF, Mayor Jenderal Lamidi Adeosun mengatakan sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2016, tidak kurang 675 anggota Boko Haram tewas dan 566 orang lainnya berhasil ditangkap. Adeosun juga mengatakan bahwa pasukan MNJTF berhasil menghancurkan sebanyak 32 kamp Boko Haram termasuk pabrik pembuatan alat peledak, serta menangkap dan menghancurkan peralatan teroris yang mencakup 318 sepeda motor, 84 kendaraan, 137 macam senjata, 18 kapal dan peralatan logistic lainnya (Opejobi, 2016). Operasi militer

yang dilakukan oleh MNJTF ini telah mengurangi jumlah pasukan Boko Haram dan menyebabkan kelompok tersebut tidak dapat lagi melakukan serangan-serangan secara terorganisir. Selain itu, kelompok ini juga harus menyusun strategi penyerangan baru yang tidak dapat diprediksi oleh pasukan perdamaian MNJTF.

### **C. Dukungan Sosial dan Ekonomi Uni Afrika untuk Nigeria**

Keberadaan Uni Afrika di Nigeria dalam membantu menangani konflik Boko Haram tentunya memberikan keuntungan bagi negara tersebut. Tidak hanya melakukan operasi militer bersama beberapa negara tetangga, seperti Kamerun, Chad, Niger, Nigeria dan Benin, Uni Afrika juga membantu memberikan bantuan dana. Bantuan ini diberikan karena adanya ketidakstabilan di Nigeria yang disebabkan konflik kekerasan oleh kelompok pemberontak Boko Haram sejak tahun 2009 hingga saat ini. Bantuan ekonomi dan pinjaman yang diberikan akan digunakan untuk menambah peralatan militer dan persenjataan, membantu para pengungsi atau membangun fasilitas negara yang telah hancur akibat konflik yang terjadi.

Serangan yang dilakukan oleh Boko Haram menyebabkan timbulnya banyak korban tewas serta rusaknya fasilitas umum, seperti gedung pemerintahan, kamp militer, sekolah dan tempat ibadah. Banyaknya kerusakan di berbagai bidang, menyebabkan Nigeria bergantung pada pinjaman dalam negeri dan hibah dari luar negeri (Chairunnisa, Peran Uni Afrika dalam Menangani Kelompok Militan Boko Haram di Nigeria, 2016). Sebagai organisasi regional Afrika, Uni Afrika mendukung bantuan dari aktor selain pemerintah, seperti individu, donator, perusahaan multinasional atau internasional yang memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam hal ini Uni Afrika berperan sebagai pengelola dana yang didapatkan untuk membantu membiayai kebutuhan negara Nigeria yang mengalami krisis akibat dari kekerasan dan serangan yang dilakukan oleh Boko Haram.

Nigeria telah banyak menghabiskan dana untuk memerangi Boko Haram yang terus melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Nigeria. Hal ini menyebabkan Nigeria sangat membutuhkan adanya bantuan dana dari berbagai aktor. Salah satu negara yang memberikan bantuan kepada Nigeria yaitu Inggris (*United Kingdom*). Inggris memberikan bantuan dana sebesar € 200 juta (US \$ 259 juta) pada bulan Agustus 2017, setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson ke wilayah timur laut Nigeria. Bantuan tersebut merupakan bantuan darurat lima tahun untuk Nigeria (Robertson, 2017).

Selain negara Inggris, bantuan ekonomi juga didapatkan dari Amerika Serikat. Dimana AS telah mengumumkan tambahan US\$ 500 juta untuk bantuan kemanusiaan bagi penduduk Nigeria dan negara-negara tetangga seperti Chad, Kamerun dan Niger yang terkena dampak serangan oleh kelompok pemberontak Boko Haram. Nathan Holt, wakil Direktur, Kantor Urusan Afrika Barat, Biro Urusan Afrika di Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa negaranya telah menyediakan dana hamper US\$ 500 juta untuk bantuan kemanusiaan selama dua tahun terakhir (Vanguard, 2017). Selain itu, bantuan juga datang dari organisasi internasional Uni Eropa. Mengutip dari *European Commission*, Uni Eropa mengumumkan telah memberikan bantuan dana sebesar € 58,2 juta untuk membantu krisis yang terjadi di wilayah Danau Chad di Afrika, khususnya daerah yang paling parah terkena serangan Boko Haram, seperti Nigeria, Niger, Chad dan Kamerun. Uni Eropa juga berkomitmen akan membantu penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan mengalami kekerasan di empat negara tersebut (European Commission, 2016).

Selain itu, keberadaan Uni Afrika sebagai organisasi regional sangat membantu bagi Nigeria dalam menangani kelompok pemberontak Boko Haram. Tidak hanya membantu dengan melakukan operasi militer bersama pasukan MNJTF, Uni Afrika juga membantu dalam bidang sosial. Banyaknya serangan yang dilakukan oleh Boko Haram di berbagai

wilayah Nigeria menyebabkan banyak korban tewas serta penduduk yang kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, Boko Haram yang juga menyerang fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, kamp militer, sekolah dan tempat ibadah juga menyebabkan banyak anak-anak yang kehilangan sekolahnya. Hal itu tentu saja menyebabkan banyaknya pihak internasional yang mendesak Uni Afrika untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan di Nigeria (Chairunnisa, Peran Uni Afrika dalam Menangani Kelompok Militan Boko Haram di Nigeria, 2016).

Dalam konflik Boko Haram di Nigeria, Uni Afrika berperan sebagai *peace-building*. Dimana *peace-building* diartikan sebagai sebuah upaya berupa bantuan internasional yang ditujukan untuk menyembuhkan perasaan trauma setelah terjadinya perang dan meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekerasan melalui pembangunan kembali aspek-aspek sosial, budan dan ekonomi negara yang berkonflik (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 1999). Pendekatan *peace-building* ini lebih mengarah pada bagaimana perdamaian yang berkelanjutan dapat dibentuk sehingga positive peace benar-benar dapat diperoleh setelah terjadinya konflik di suatu negara.

Serangan yang dilakukan oleh Boko Haram akibat ketidakpuasaannya dengan pemerintah Nigeria telah meningkat dan terus meluas ke lintas batas dan menjadi semakin regionalisasi. Hal ini telah menghambat beberapa bantuan kemanusiaan yang akan diberikan bagi para korban kekerasan Boko Haram. Sehingga pihak internasional mendorong Uni Afrika untuk melakukan upaya yang tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga membangun komunitas dan membangun kembali mereka yang terkena dampak kekerasan kelompok pemberontak tersebut. Para ahli PBB menekankan bahwa melawan terorisme dan menangani ancaman Boko Haram tidak dapat dilakukan hanya dengan operasi militer, akan tetapi juga memperhatikan bidang kemanusiaan yang menderita akibatnya terjadinya konflik. Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB siap untuk membantu Nigeria dalam rehabilitasi

dan reintegrasi. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk pemulihan dan rehabilitasi yang didasarkan pada norma-norma hak asasi manusia serta mempertimbangkan dampak konflik tersebut bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, mereka juga akan memastikan bahawa program reintegrasi dan rehabilitasi ini dilakukan pada setiap orang, dimanapun mereka tinggal. Dan secara khusus, sistem kesehatan akan diperkuat, agar dapat memenuhi kebutuhan fisik dan mental para korban konflik tersebut (Houkanli, 2016).

Dalam rangka memberi dukungan kemanusiaan bagi korban konflik Boko Haram, Uni Afrika juga melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga Nigeria seperti Chad, Kamerun dan Niger. Negara-negara tersebut juga memiliki tanggung jawab utama untuk membantu dan melindungi para pengungsi di negaranya. Selain itu, Uni Afrika juga bekerjasama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), sebuah komisioner tinggi PBB yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi atas permintaan suatu negara atau pun PBB. Badan ini dibentuk pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB dan berbasis di Jenewa, Swiss. Selain melindungi dan membantu pengungsi di berbagai negara yang membutuhkan, UNHCR juga mendampingi proses pemindahan pengungsi ke tempat yang baru. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1951, badan ini telah membantu lebih dari 50 juta pengungsi untuk kembali memulai dan membangun kehidupan mereka (UNHCR).

Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok militan Boko Haram ini telah menyebabkan 2,2 juta penduduk Nigeria mengungsi ke negara-negara tetangga seperti, Chad, Kamerun dan Niger. Mengutip dari *Siarjustisia*, wakil UNHCR untuk Nigeria, Angele Dikongue-Atangana mengungkapkan bahwa UNHCR tidak akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nigeria, akan tetapi kepada para pengungsi dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Dalam menangani pengungsi, UNHCR telah berhasil memulangkan 165 pengungsi ke Nigeria dan kembali akan



memulangkan sebanyak 452 pengungsi ke negaranya Kamerun. Dalam hal ini, UNHCR juga bekerjasama dengan badan-badan terkait untuk memastikan para pengungsi mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak makanan, kesehatan dan keamanan (Siarjustisia, 2015).

Bersama dengan Uni Afrika, UNHCR terus melakukan koordinasi dalam merespon dan menangani pengungsi yang ada di Nigeria dan negara-negara tetangganya seperti Chad, Kamerun dan Niger. Pertemuan rutin antar sektor dan koordinasi antar sektor yang diselenggarakan di ibukota N'Djamena dan di daerah perbatasan Danau Chad, Baga Sola, dengan Komisi *Nationale d'Accueil et de Reinsertion des Réfugiés et des Rapatriés* (CARR). Koordinasi yang dilakukan antar sektor ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan.

Selain bekerjasama dengan UNHCR, bantuan kemanusiaan juga datang dari *International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau Palang Merah Internasional dalam membantu pengungsi akibat konflik Boko Haram. ICRC merupakan sebuah organisasi yang bersifat netral dan independen yang mempunyai misi humaniter khusus untuk melindungi korban-korban perang bersenjata ataupun korban kekerasan lainnya serta mendampingi mereka dengan memberikan bantuan. ICRC juga mempunyai tugas khusus untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional. Kasus Boko Haram di Nigeria merupakan sebuah pelanggaran Hukum Humaniter dimana kelompok pemberontak tersebut merupakan konflik bersenjata non internasional. Sehingga berdasarkan *common article 3 to Geneva Convention*, ICRC mendapat kewenangan untuk memberikan bantuan dalam setiap konflik bersenjata non internasional (S, Samekto, & Hardiwinoto, 2016).

ICRC merupakan organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban kekerasan Boko Haram dengan terjun langsung ke Nigeria. Bantuan yang diberikan yaitu ;

*Pertama*, makanan dan air. Kurangnya makanan dan air merupakan masalah pokok yang dialami oleh pengungsi dan

orang-orang yang terlantar akibat konflik dinegaranya. Bersama dengan *Nigeria Red Cross* (Palang Merah Nigeria), ICRC mendistribusikan bantuan makanan bagi penduduk sipil yang menjadi korban kekerasan Boko Haram. Bantuan yang didistribusikan tersebut berupa 960 metrik ton makanan dan bantuan lainnya bagi 510.000 pengungsi. Selain itu, pada awal bulan Oktober 2016, ICRC mendistribusikan makanan bagi lebih dari 2.000 orang di Diffa dan lebih dari 3.500 orang yang berlindung di pulau-pulau di Danau Chad. Selain itu, ICRC juga menyediakan akses air bersih bagi lebih dari 80.000 orang dan memberikan bantuan makanan untuk 880 perempuan di Maiduguri yang kehilangan suaminya dalam konflik tersebut.

*Kedua*, bantuan kesehatan. Banyak penduduk yang mengalami masalah kesehatan saat mereka berlindung untuk menyelamatkan diri. Seperti perempuan yang sedang hamil harus melahirkan di tempat yang tidak kondusif dan steril. Akan tetapi, dokter dan ahli bedah tidak dapat memberikan bantuan karena harus berurusan dengan masalah kesehatan yang lain, seperti menangani korban serangan bom. Dalam hal ini, ICRC bekerjasama dengan kementerian kesehatan Borno untuk memperbaharui pusat kesehatan Malla Kachalla di Maiduguri dengan melatih dan menambah staff medis untuk menolong korban Boko Haram. Selain itu, ICRC dibantu dengan Palang Merah Nigeria memberikan pelatihan kepada 1.850 orang dan mengirimkan tim bedah mobil untuk mengobati korban luka-luka akibat konflik (S, Samekto, & Hardiwinoto, 2016).

*Ketiga*, bantuan untuk daerah yang terkena konflik. Banyak wilayah yang rusak dan hancur akibat konflik antara pemerintah dengan kelompok pemberontak Boko Haram. Oleh karena itu, ICRC berusaha untuk membantu melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah tersebut. Organisasi ini memberikan bantuan dengan membangun tower air beserta tangki yang memiliki kapasitas 4.000 liter dan memasang sistem pasokan air bertenaga surya. Selain itu, ICRC juga menyediakan pupuk dan bibit jagung bagi 2.000 keluarga yang

akan memulai kembali aktivitas pertanian mereka (S, Samekto, & Hardiwinoto, 2016).

Kerjasama yang dilakukan oleh Uni Afrika dengan beberapa organisasi internasional ini sangat membantu mengurangi beban kemanusiaan orang-orang yang menjadi korban kekerasan oleh kelompok pemberontak Boko Haram. Kerjasama ini masih berlangsung hingga tahun 2016 dan akan berlangsung selama beberapa tahun kedepan. Karena konflik antara pemerintah dengan Boko Haram belum berakhir dan masih banyak pengungsi yang berada di Nigeria, Niger, Kamerun dan Chad yang membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk mempertahankan kehidupan mereka.